

BAB V

GERAKAN FEMINIST SOCIAL MOVEMENT DALAM MELAWAN PRAKTIK FGM DI GAMBIA

5.1 Nilai-Nilai Kesetaraan Gender dan Non Diskriminasi dalam Hak Kesehatan Perempuan

Dalam kehidupan sosial, adanya ketimpangan gender tersebut menjadikan perempuan beserta hak-haknya seringkali disingkirkan, diabaikan, dan tidak dianggap, bahkan seringkali seorang wanita diperlakukan sebagai benda hak milik dan hampir tidak memiliki hak atas apapun, baik harta benda, kebebasan menentukan masa depan, bahkan kontrol atas diri, seksualitas, dan tubuhnya sendiri. Akibatnya, maka lahirlah tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat, laki-laki, bahkan pemerintah terhadap perempuan (Rahayu, 2012: 2).

Persoalan di atas tersebut yang menjadi persoalan yang terjadi di Gambia. Persoalan FGM bukan hanya semata-mata pada persoalan teknis tentang pemotongan bagian kecil alat kelamin perempuan, namun persoalan FGM merupakan hal-hal yang menyangkut posisi wanita dalam kehidupan sosial di Gambia.

FGM mengangkat masalah diskriminasi, hak asasi manusia dan hak atas kesehatan, kesehatan masyarakat dalam hal pencegahan risiko untuk anak perempuan, dan kesehatan seksual, reproduksi dan kesehatan ibu untuk wanita yang telah menjalani prosedur (Andro, 2016: 218).

Praktik FGM merupakan perilaku yang menjadikan perempuan sebagai sebuah objek dari persoalan budaya yang telah lama berkembang. Tanpa disadari, FGM tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang benar atau salah, namun lebih kepada aturan yang harus dijalankan karena menyangkut dan mempengaruhi seluruh aspek perempuan dalam kehidupannya.

FGM dianggap penting bagi seorang gadis bila ia ingin menjadi perempuan seutuhnya. Praktik ini memberikan suatu perbedaan jenis kelamin dikaitkan dengan peran mereka di masa depan dalam kehidupan perkawinan. Pengangkatan bagian klitoris dianggap sebagai penghilangan organ laki-laki di tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan utuh dan sempurna (Rahayu, 2012: 5).

Pada praktiknya, FGM dipercaya dapat mengurangi hasrat seksual perempuan akan seks, sehingga dapat mengurangi terjadinya praktik seks di luar nikah. Kesetiaan seorang perempuan yang tidak dimutilasi akan sangat diragukan oleh masyarakat. Dalam masyarakat yang mempraktikkan FGM, seorang perempuan yang tidak dimutilasi tidak akan mungkin mendapatkan jodoh (Rahayu, 2012: 5).

Namun, apa yang terjadi di Gambia, sebetulnya mencerminkan bahwa FGM adalah manifestasi dari ketidaksetaraan gender yang tertanam kuat dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik. Praktik FGM mewakili kontrol masyarakat terhadap perempuan. Praktik-praktik semacam itu memiliki efek melanggengkan peran gender normatif yang tidak setara dan merugikan perempuan (WHO, 2008: 5).

Sebagai contoh, seringkali ada harapan bahwa pria hanya akan menikahi wanita yang telah menjalani FGM. Keinginan untuk perkawinan yang layak, yang seringkali penting untuk jaminan ekonomi dan sosial serta untuk memenuhi cita-cita lokal tentang kewanitaan dan feminitas, dapat menjelaskan kegigihan praktik tersebut (WHO, 2008: 6).

FGM memberikan ruang bagi perempuan untuk kesempatan dalam memiliki hak dan kesetaraan dengan laki-laki. Kondisi tersebut merupakan perilaku diskriminatif terhadap keberadaan perempuan dalam kehidupan sosial perempuan-perempuan di Gambia.

Mutilasi genital perempuan melanggar serangkaian prinsip, norma, dan standar hak asasi manusia yang mapan, termasuk prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, hak untuk hidup ketika prosedur menghasilkan kematian, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat serta hak yang diidentifikasi di bawah ini. Karena mengganggu jaringan genital yang sehat tanpa adanya kebutuhan medis dan dapat menyebabkan konsekuensi yang parah bagi kesehatan fisik dan mental wanita, mutilasi genital wanita merupakan pelanggaran terhadap hak seseorang untuk mendapatkan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai (WHO, 2008: 9).

Mutilasi alat kelamin perempuan telah diakui sebagai diskriminasi berdasarkan jenis kelamin karena berakar pada ketidaksetaraan gender dan ketidakseimbangan kekuatan antara laki-laki dan perempuan dan menghambat kenikmatan hak asasi perempuan mereka secara penuh dan setara. Ini adalah bentuk kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan, dengan konsekuensi fisik dan psikologis. Mutilasi alat kelamin wanita membuat anak perempuan dan perempuan tidak bisa membuat keputusan independen tentang intervensi yang memiliki efek abadi pada tubuh mereka dan melanggar otonomi dan kontrol mereka atas hidup mereka.

Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan kebebasan beragama dilindungi oleh hukum internasional. Namun, hukum internasional menetapkan bahwa kebebasan untuk memanasikan agama atau kepercayaan seseorang mungkin tunduk pada batasan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak dasar dan kebebasan orang lain. Karena itu, klaim sosial dan budaya tidak bisa dipergunakan untuk membenarkan mutilasi alat kelamin wanita (WHO, 2008: 10).

Dalam praktiknya, FGM telah menjadi sebuah budaya di Gambia yang menempatkan perempuan pada posisi lemah dan tidak memiliki kebebasan atau kesetaraan hak dengan laki-laki. Terlebih lagi aturan yang berkembang di dalam lingkup masyarakat dan negara, memaksa perempuan untuk tidak memiliki perlindungan terhadap hak-hak yang menyangkut hak pribadi, seperti kesehatan.

Dengan kata lain, praktik FGM sama sekali tidak mencerminkan kesetaraan posisi wanita dan laki-laki. Kedudukan perempuan berada dibawah laki-laki, perempuan memiliki kedudukan yang tidak sama dengan laki-laki serta hak-hak dan peranan yang dihilangkan karena faktor budaya serta peran negara yang tidak memperjuangkan hak-hak perempuan.

5.2 Advokasi dan Resistensi Feminist Social Movement di Gambia

Karena FGM atau mutilasi alat kelamin perempuan adalah manifestasi dari ketidaksetaraan gender, pemberdayaan perempuan melalui sebuah gerakan untuk melakukan perubahan adalah kunci penting untuk menghilangkan praktik tersebut dalam kehidupan sosial di Gambia.

Diperlukan sebuah perilaku yang mengedepankan hak asasi perempuan dan anak perempuan dan perlakuan yang berbeda dari anak laki-laki dan perempuan berkaitan dengan peran mereka dalam masyarakat secara umum, dan khususnya sehubungan dengan mutilasi alat kelamin perempuan. Ini dapat berfungsi untuk memengaruhi hubungan gender dan dengan demikian mempercepat kemajuan dalam meninggalkan praktik (WHO, 2008: 15).

Untuk mengatasi persoalan FGM dan dalam memperjuangkan hak-hak wanita, terutama hak kesehatan wanita, serta persoalan diskriminasi dan kesetaraan gender, diperlukan adanya perubahan sosial yang mampu menghilangkan pelestarian budaya FGM yang telah lama berkembang.

Dengan adanya perubahan cara pandang untuk menghilangkan praktik FGM dan menentang budaya yang telah lama menjadi bagian dalam kehidupan sosial di Gambia, maka ruang bagi wanita untuk mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan perlu diperjuangkan.

Namun, berjuang melawan praktik FGM adalah "pekerjaan berbahaya" dan para aktivis sering dituduh menyerang Alquran. Seorang perwakilan GAMCOTRAP, sebuah yayasan yang memberikan informasi tentang bahaya praktik FGM bagi kaum perempuan, menyatakan bahwa para aktivis yang menentang FGM pertama-tama dianggap memusuhi budaya Afrika dan Islam.

Perwakilan tersebut menjelaskan bahwa praktik FGM secara tradisional "diselimuti kerahasiaan" dan bahwa mereka yang membicarakannya di depan umum dianggap tidak sopan terhadap budaya. Perwakilan tersebut menyatakan bahwa, di masa lalu, radio nasional telah melarang penyiaran program yang mendorong pengabaian FGM dan, pada 1997, sebuah dekret presiden "yang mengancam" aktivis anti-FGM diterbitkan. Amnesty International (AI) juga menyatakan bahwa GAMCOTRAP telah menghadapi "pelecehan" di masa lalu.

Dengan kata lain, terdapat individu-individu serta kelompok yang memiliki perspektif berbeda yang menentang wewenang, status quo, serta budaya yang mapan, yaitu praktik FGM yang dianggap melanggar HAM. Meski begitu, fakta di lapangan seringkali menggambarkan aktivis yang menentang FGM terkadang dihina, "dilecehkan" atau "dianiaya" oleh anggota masyarakat lain yang

mengabaikan dampak negatif FGM pada perempuan dan anak perempuan. Meski begitu, lebih banyak orang meminta informasi tentang dampak negatif FGM. (Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, 2018).

Dengan adanya keresahan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap praktik FGM, dorongan perubahan sosial untuk menghapus praktik tersebut sbeteulnya besar. Banyak individu-individu, terutama kaum perempuan yang menginginkan perubahan sosial yang lebih berpihak kepada mereka.

Individu dan kelompok-kelompok tersebut bergerak untuk melakukan perubahan terhadap kondisi sosial yang merugikan perempuan. Perubahan sosial dalam masyarakat dapat ditingkatkan dengan kegiatan di tingkat nasional dan melintasi batas-batas nasional. Di Gambia, terdapat pergerakan sosial yang dimotori oleh beberapa kelompok pergerakan sosial yang menentang praktik FGM dan berupaya memperjuangkan hak-hak perempuan atau mendorong munculnya ideologi feminist terkait kesetaraan gender dan perilaku diskriminatif terhadap perempuan.

Diantaranya adalah Ifrah Foundation (Somalia), Samburu Girls Foundation (Kenya), dan The Girls Agenda (Gambia), serta Safe Hands for Girls (Gambia). Kelompok-kelompok pergerakan sosial tersebut merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Governmental Organization (NGO), terutama The Girls Agenda, dan Safe Hands for Girls, yang melakukan social movement atau pergerakan sosial untuk melakukan perubahan terhadap praktik FGM di Gambia.

Para aktivis yang tergabung di dalam NGO-NGO tersebut berupaya untuk melakukan advokasi kepada masyarakat tentang dampak negatif FGM bagi kaum perempuan sekaligus melakukan resistensi atau perlawanan terhadap praktik FGM sebagai sebuah budaya yang perlu dihilangkan dalam kehidupan sosial di masyarakat Gambia.

The Girls Agenda merupakan salah satu NGO yang melakukan gerakan social dan berkembang di Republik Gambia. NGO ini dibangun pada tahun 2011 dan berbasis di Brikama, Republik Gambia. Organisasi ini diusung untuk mengakhiri kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan seperti halnya praktik FGM dan pernikahan paksa terhadap anak perempuan. The Girls Agenda memiliki

semboyan “*by the young and for the young*” (dari pemuda untuk pemuda). Oumie Sissokho selain aktivis pembela perempuan, ia juga salah satu pendiri dari organisasi ini, dan juga salah satu Duta Besar untuk mengakhiri praktik FGM (*End FGM Brand Ambassador*) (Ali, 2020).

Selain itu, Safe Hands for Girls juga merupakan organisasi/gerakan social yang berkembang di Republik Gambia. NGO ini dibangun pada tahun 2013 oleh Jaha Dukureh dengan tujuan untuk mengakhiri adanya praktik FGM serta pernikahan dini terhadap anak perempuan di Afrika khususnya di Republik Gambia. Jaha Dukureh adalah korban dari praktik FGM hingga menuntunnya untuk menjadi seorang aktivis hak perempuan di Gambia, dan juga sebagai Duta Besar Wanita PBB untuk Afrika (*Regional UN Women Ambassador for Africa*) (Mogoatlhe, 2020). Beliau juga turut menumpahkan cerita pengalamannya serta perjuangannya dalam mengakhiri FGM di Republik Gambia melalui video pendek berjudul *Jaha’s Promise*.

Kedua NGO tersebut bergerak untuk mendukung berbagai lapisan masyarakat, terutama kaum perempuan untuk memperoleh informasi terkait dampak negatif FGM, sekaligus upaya untuk mendapatkan hak-hak perempuan dalam berbagai bidang

Ketika terdapat sekelompok orang yang mengatur atau mengorganisir dirinya dalam upaya untuk mendorong atau menolak beberapa jenis perubahan social, maka mereka sedang menciptakan sebuah gerakan social (Locher, 2002) dikutip dalam (Sukmana, Konsep dan Teori Gerakan Sosial, 2016, p. 4). Yang berarti, apabila terdapat sekelompok orang yang bergabung secara bersama-sama untuk mencapai satu tujuan yang sama yakni mendapatkan atau memperjuangkan sesuatu; dalam artian menginginkan adanya atau menolaknya suatu perubahan social. Maka mereka sedang membuat gerakan social.

Gerakan sosial yang dimotori oleh NGO-NGO di Gambia, yang sebagian besar dilakukan oleh aktivis-aktivis perempuan dengan tujuan mendapatkan hak-hak perempuan, terutama kesehatan dan hak sosial lainnya, maka munculnya gerakan social di Republik Gambia merupakan upaya para Feminist untuk menolak

adanya praktik yang berbahaya; dalam hal ini FGM, serta mendorong para perempuan untuk berani melawan dan mengatakan tidak pada praktik ini.

Upaya secara kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif dilakukan oleh Pergerakan sosial Safe Hands for Girls. NGO tersebut yang dimotori oleh Jaha Dukureh, seorang aktivis perempuan yang menentang praktik FGM dan berjuang untuk nilai-nilai kesetaraan gender serta non diskriminasi terhadap hak-hak perempuan di Gambia. NGO tersebut menekankan pada bentuk perubahan sosial dalam menghilangkan FGM dengan visi : *A world in every woman and girl is free from FGM and all forms of gender- based violence, and has the support, knowledge, tools and self-esteem to reach her full potential* (safehandforgirls.com, 2013). Safe Hands for Girls (selanjutnya disebut SHfG) adalah organisasi yang dipimpin perempuan yang didedikasikan untuk membantu perempuan dan anak perempuan yang telah melalui FGM atau berisiko menghadapi praktik FGM. (safehandforgirls.com, 2013).

Di Gambia, proyek Safe Hands for Girls berfokus pada mendidik kaum muda, dan pada advokasi dan pengembangan kesadaran untuk masyarakat umum. Mengakhiri FGM dalam tujuan utama proyek Gambia adalah untuk membantu mengakhiri FGM dengan mengubah persepsi dan keyakinan tentang praktik di antara populasi Gambia melalui pendidikan, kesadaran dan advokasi yang ditujukan pada 1) anak muda sebagai orang tua masa depan; 2) pemimpin agama dan penatua komunitas etnis; dan 3) orang tua, serta populasi pada umumnya (diningforwomen.org, 2016).

Melalui langkah advokasi, SHfG bergerak untuk mendidik kaum perempuan untuk menciptakan kesetaraan gender dan hilangnya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Gambia sehingga penerapan FGM dapat dihilangkan. Pergerakan feminist social movement itu sendiri dilakukan untuk memperjuangkan melalui pergerakan sosial.

SHfG mendidik penduduk tentang hukum dan hukumannya oleh komunitas dan pendidikan sekolah. Tujuannya adalah untuk menetapkan program pendidikan di rata-rata lima sekolah di setiap wilayah Gambia.

Berbagai program pendidikan yang ditujukan untuk menentang wewenang dan pelestarian budaya FGM, serta perluasan pengaruh dalam meningkatkan dan memperkuat perspektif tentang feminis, yaitu nilai-nilai dan hak-hak perempuan, didanai oleh Dining for Women (DFW) meliputi School Outreach, Youth Peer Leadership, dan Booth Information program, dan akan membantu memperluas proyek ke lima wilayah tambahan di Gambia.

Untuk Program Penjangkauan Sekolah, Safe Hands bekerja dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Gambia, yang memilih sekolah yang akan mereka kunjungi di setiap wilayah dan berkoordinasi dengan administrasi sekolah. Anak perempuan merupakan 75-80 persen siswa. Pada akhir program sekolah, Safe Hands dan staf sekolah mengidentifikasi siswa yang akan diundang untuk ambil bagian dalam program Kepemimpinan Peer Remaja, dan lagi-lagi 75-80 persen adalah perempuan. Safe Hands merekrut, melatih dan mengelola sukarelawan yang akan membantu mengimplementasikan program penjangkauan sekolah dan kampanye informasi booth. Setiap komunitas berbeda, jadi Safe Hands untuk Anak Perempuan bergantung pada bimbingan oleh para pemimpin perempuan di masyarakat, yang merupakan penasihat mereka.

Proyek ini diharapkan dapat menjangkau 1.000 siswa perempuan di ruang kelas mereka dengan informasi yang dapat mengubah pengetahuan dan persepsi mereka tentang FGM dan niat mereka untuk bertindak terkait praktik tersebut. Ini akan melatih dan mendukung hingga 150 anak perempuan sebagai Peer Leader yang bekerja di sekolah dan komunitas mereka sebagai advokat yang berkelanjutan. Ini juga akan menjangkau setidaknya 2.000 wanita dan anak perempuan (dan 1.000 pria dan pria) di komunitas mereka dengan informasi tentang FGM yang dapat mengubah pendapat dan keyakinan mereka.

Dalam memperjuangkan tujuan dari gerakan sosial tersebut, SHfG didirikan di Atlanta pada 2013 oleh Jaha Dukureh, seorang wanita muda Gambia yang pindah ke Amerika Serikat, untuk memberikan dukungan emosional dan praktis bagi para pengungsi dan perempuan imigran - yang selamat dari FGM - dari Gambia dan negara-negara Afrika lainnya (diningforwomen.org, 2016).

Sebagai orang yang selamat dari FGM dan pernikahan dini, Jaha memulai SHfG d setelah menyadari bahwa ada begitu banyak gadis dan wanita seperti dia di komunitasnya dan bahwa gerakan yang dipimpin oleh orang yang selamat dan sistem pendukung sudah terlambat. Safe Hands for Girls dengan cepat memperluas jangkauannya untuk memasukkan remaja dan wanita muda di sekolah mereka dan untuk melatih para dokter tentang perawatan sensitif bagi para penyintas FGM, menjangkau lebih dari 100 wanita dan gadis di tahun pertama.

Dengan kondisi tersebut, maka SHfG merupakan NGO yang berupaya untuk melakukan perubahan sosial agar kaum perempuan di Gambia dapat hidup layaknya manusia yang juga memiliki hak, terutama hak kesehatan yang tidak mereka dapatkan di Gambia.

Untuk itu, SHfG telah bermitra dengan kementerian pendidikan Gambia untuk meluncurkan tur bus merah muda nasional (*pink bus*) yang penuh semangat yang telah menjangkau ribuan siswa, membangkitkan semangat mereka untuk mengakhiri FGM di generasi ini.

Pergerakan sosial melalui kampanye tersebut ditujukan untuk memberikan advokasi pendidikan tentang berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik FGM. Advokasi menjadi saran bagi NGO dan aktivis untuk memberikan pemahaman dalam merubah berbagai persoalan sosial terkait hak-hak perempuan.

Kampanye ini sangat didukung di media sosial dan pesan positif dari perubahan masyarakat Gambia mendapat daya tarik sangat cepat. Kementerian menghubungi setiap sekolah terlebih dahulu, meminta mereka untuk mendorong kaum muda untuk berpartisipasi penuh. Ini berarti bahwa para aktivis dapat memimpin majelis, berbicara di seluruh kelas, dan menghabiskan banyak waktu di setiap sekolah berbicara dengan anak perempuan, anak laki-laki dan guru mereka.

Kampanye tersebut memegang peranan penting di dalam upaya advokasi untuk memberikan pengaruh besar di dalam merubah pola pikir dan kebiasaan tentang praktik FGM sekaligus memberikan pemahaman yang lebih baik melalui pendidikan informasi tentang hak-hak perempuan yang perlu diperjuangkan.

Selain Safe Hand for Girls, terdapat NGO lain yang juga memiliki visi yang sama, yaitu perubahan kondisi sosial untuk berjuang bagi perempuan-perempuan

di Gambia agar mendapatkan kesetaraan gender, non diskriminasi dan hak-hak lainnya, seperti hak kesehatan perempuan, yaitu The Girls Agenda.

Berbasis di Gambia, misi The Girls Agenda adalah untuk secara antusias mengadvokasi penghormatan terhadap hak asasi perempuan dan anak perempuan dan memungkinkan mereka untuk hidup dalam kebebasan dan martabat. The Girls 'Agenda didirikan oleh wanita muda yang dinamis yang berasal dari komunitas di mana pernikahan dini adalah hal yang biasa. Mereka menganjurkan menentang pernikahan anak melalui mobilisasi masyarakat, peningkatan kesadaran, pelatihan sekolah, dan penggunaan media tradisional dan media sosial (girlsnotbrides.com, 2002).

Aktivis dan NGO lain juga muncul dalam menentang wewenang, status quo, serta budaya yang mapan terkait praktik FGM, yaitu The Girl Generation. NGO ini juga memiliki tujuan yang hendak dicapai yang berkaitan dengan perubahan sosial (thegirlgeneration.org, 2016).

The Girl Generation, sebuah keanggotaan kolektif dan mitra global yang disatukan oleh visi bersama bahwa FGM dapat dan harus berakhir pada generasi ini. The Girl Generation adalah platform untuk mempercepat perubahan sosial, menyatukan ratusan dan ribuan suara di bawah satu identitas positif, yang menantang norma-norma sosial yang mempertahankan FGM. NGO ini berkontribusi pada pertumbuhan gerakan untuk mengakhiri FGM, dengan memperkuat komunikasi perubahan sosial, berbagi kisah-kisah perubahan yang menginspirasi, dan meningkatkan sumber daya.

The Girls Generation fokus pada pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, terutama anak-anak yang harus mengalami paksaan dalam pernikahan dalam usia yang masih muda. NGO ini menilai bahwa hilangnya hak-hak perempuan dalam kebebasan.

Perkawinan anak terus menjadi pelanggaran serius terhadap hak anak perempuan-anak di seluruh Afrika dan angka prevalensi tetap tinggi di Gambia terdapat hampir 36% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Anak-anak yang menikah lebih mungkin menghadapi tantangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan dewasa mereka. Ketika seorang gadis keluar dari sekolah dan akhirnya

terjebak dalam pernikahan yang tidak ia pilih, dengan bayi yang tubuhnya belum siap untuk menghasilkan, hak fundamentalnya untuk kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat tidak ada (girlsnotbrides.com, 2002).

Perkawinan anak merampas gadis-gadis masa kecil mereka, tanpa melarikan diri dari kemiskinan dan meninggalkan "perkawinan" di mana mereka tidak memiliki suara. Pengambilan keputusan yang sama terkait dengan jarak kelahiran, kontrasepsi dan hak untuk bekerja adalah cita-cita, belum menjadi kenyataan. Meskipun pernikahan anak mempengaruhi seluruh masyarakat, terbukti bahwa anak perempuan menanggung beban. Melibatkan anak perempuan dalam perjuangan untuk mengakhiri pernikahan anak adalah hal yang mendasar.

Melalui perjuangan dalam menentang segala bentuk penindasan terhadap perempuan, baik praktik FGM maupun keinginan untuk memiliki kesetaraan dalam kehidupan sosial, baik di keluarga maupun di lingkup lingkungan, NGO-NGO tersebut melakukan advokasi dan menentang segala bentuk budaya, terutama praktik FGM.

Tujuan dari pergerakan sosial tersebut adalah sebuah proses perubahan sosial yang mengarah pada keputusan bersama untuk mengakhiri mutilasi alat kelamin wanita. Kegiatan harus melibatkan pemimpin tradisional, agama dan pemerintah, anggota parlemen dan organisasi masyarakat sipil (WHO, 2008: 16).

Perubahan tatanan kehidupan yang baru mendorong terjadinya perubahan sosial maupun yang menentang perubahan sosial tersebut, diantaranya:

1. kedudukan perempuan tidak lagi berada dibawah laki-laki, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki serta hak-hak dan peranan yang sama
2. kaum perempuan secara sadar harus memperjuangkan hak-hak-nya sebagai perempuan
3. untuk membangun, mendefinisikan serta mencapai suatu kesetaraan gender di lingkup ekonomi, politik, social, budaya, dan termasuk individu

4. suatu perubahan terhadap isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan kekerasan seksual, yang pada intinya perempuan ingin dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, gerakan ini turut mengkampanyekan hak-hak perempuan seperti; hak memiliki cuti hamil, hak-hak reproduksi, hak mendapatkan upah yang setara, serta memiliki hak untuk memilih

Pergerakan feminisme dalam social movement di Gambia ditujukan untuk menciptakan kesetaraan gender dan hilangnya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Gambia sehingga penerapan FGM dapat dihilangkan. Pergerakan feminist social movement itu sendiri dilakukan untuk memperjuangkan melalui pergerakan sosial untuk merubah kondisi politik, terutama peran negara dalam melindungi hak-hak perempuan melalui kepastian hukum dan undang-undang.

Apa yang dilakukan para aktivis dan NGO yang berjuang melalui advokasi dan resistensi terhadap budaya praktik FGM adalah sebuah ekspresi perlawanan yang ditujukan untuk melakukan perubahan terhadap maraknya isu FGM terhadap kaum perempuan di Gambia. Melalui penggalangan kekuatan yang menghasilkan social movement, komunitas atau kelompok masyarakat yang tergabung dalam pergerakan feminist atau kelompok-kelompok yang dimotori oleh kaum perempuan, gelombang protes, perlawanan dan advokasi menjadi aksi dari pergerakan sosial yang menuntut perubahan perlakuan terhadap nasib kaum perempuan terkait isu FGM di Gambia.

Kegiatan tersebut mencakup tinjauan dan reformasi undang-undang dan kebijakan serta langkah-langkah sektoral terutama dalam sistem kesehatan, pendidikan, sosial dan perlindungan hukum (WHO, 2008: 16-17).

Social movements yang berkembang di Afrika khususnya di Republik Gambia ini memegang peranan penting atas pernyataan presiden Republik Gambia pada masa itu. Pada tahun 2015, Presiden Republik Gambia Yahya Jammeh (1994-2017) menyatakan secara resmi melarang segala bentuk praktik FGM di Gambia, karena menurutnya praktik ini tidak ada di dalam ajaran Islam (BBC, 2015).

Organisasi NGO nasional dan internasional telah menjadi aktor kunci dalam merancang dan mengimplementasikan program untuk meninggalkan mutilasi genital perempuan (WHO, 2008: 19). Terdapat hasil yang cukup menggembirakan dalam kondisi sosial. Perjuangan dalam gerakan sosial untuk mengadvokasi dan menentang praktik FGM setidaknya memberikan sebuah hasil nyata.

Statistik prevalensi yang akan dirilis akhir tahun ini diperkirakan akan menunjukkan penurunan FGM di Gambia, di mana pemotongan bayi dan anak perempuan yang sangat muda sangat umum sehingga setiap perubahan cenderung menjadi jelas lebih cepat daripada di tempat lain. (Ali, 2020).

Dengan demikian, kepentingan yang diperjuangkan untuk mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat untuk meninggalkan praktik FGM dan memberikan ruang gerak bagi kaum perempuan untuk bisa lebih berpartisipasi dalam aspek kehidupan di masyarakat mulai memberikan hasil dalam membentuk kondisi sosial baru.

5.3 Penggalangan Kekuatan Komunitas Feminist Social Movement dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan di Gambia

Gambia berada di peringkat ke-76 dari 86 di Lembaga Sosial Organisasi dan Kerjasama Ekonomi (OECD) dan Indeks Gender (SIGI) 2012, dengan nilai SIGI 0,39 (SIGI, 2014). Skor ini mewakili penurunan lebih lanjut dari peringkat SIGI 2009, yang menempatkan Gambia ke-69 dari 102 negara, dengan nilai SIGI 0,19. Indeks Ketimpangan Gender (GII) adalah ukuran ketidaksetaraan berbasis gender dalam kegiatan ekonomi (diukur dengan partisipasi pasar), pemberdayaan (diukur dengan jumlah perempuan di Parlemen dan jumlah pendidikan tinggi) dan kesehatan reproduksi (diukur dengan angka kematian ibu dan tingkat kelahiran remaja) (28toomany, 2015: 32).

Persoalan tingginya ketimpangan gender yang berakibat pada langgengnya praktik FGM, mendorong berbagai aktivis maupun NGO dalam gerakan sosial untuk menghimpun kekuatan dan saling mendukung satu sama lain. Penggalangan kekuatan dimaksudkan untuk meningkatkan pengaruh secara luas ke masyarakat Gambia, baik melalui media maupun kolaborasi dan kerjasama, serta menggandeng pihak di luar Gambia.

Di awal, pelarangan pembahasan FGM melalui media diberlakukan, namun bukti menunjukkan bahwa LSM yang menggunakan media untuk advokasi terhadap praktik akan menghadapi pembatasan. Stasiun Radio Gambian, misalnya, masih membatasi siaran yang secara eksplisit membahas FGM (28toomany, 2015: 47).

Namun, terdapat pergerakan oleh Safe Hands for Girls, pada tahun 2014, yang didirikan di Georgia sebagai organisasi nirlaba dengan status IRS 501 (c) (3). Pada 2015 organisasi menerima sertifikat pendirian sebagai organisasi amal di Gambia. Pada tahun 2016 Jaha Dukureh diangkat ke daftar majalah Time “Paling Berpengaruh”, sebuah pengakuan yang telah membawa perhatian baru yang signifikan ke FGM dan Safe Hands for Girls. Dia adalah juru bicara Kampanye Global The Guardian untuk Mengakhiri FGM dari 2014 hingga 2016 (diningforwomen.org, 2016).

Selain itu, terdapat kampanye media baru 'EndFGM' diluncurkan di Gambia pada 30 Januari 2015 oleh The Standard Newspaper (dipimpin oleh Sainey Darboe, Editor). Ini adalah kampanye kolaborasi dengan UNFPA, Think Young Women dan Safe Hands for Girls, The Girl Generation, dan The Guardian Global Media Campaign yang berbasis di Inggris. The Guardian meluncurkan kampanye global di Inggris pada tahun 2014 untuk ify memperkuat pekerjaan yang dilakukan oleh aktivis dan aktivis kampanye akar rumput yang berusaha untuk bekerja menjelang akhir FGM (28toomany, 2015: 48).

NGO-NGO di Gambia, seperti Safe Hand for Girl dan The Girl Generation juga melibatkan NGO-NGO di negara lain di Afrika, mengingat persoalan FGM terjadi hampir di seluruh wilayah Afrika. Melalui kolaborasi, maka kampanye untuk mengadvokasi dan menentang praktik FGM akan menjadi lebih masif dan memberikan dukungan yang lebih luas, terlebih lagi, dunia internasional semakin menyoroti persoalan FGM di Gambia dan wilayah Afrika lainnya.

Dengan begitu, persoalan FGM tidak semata-mata hanya persoalan perempuan di Gambia saja, namun juga menjadi persoalan HAM yang banyak dibahas secara internasional. Selain itu, dengan melakukan penggalangan kekuata, maka peluang untuk meningkatkan taraf pendidikan perempuan-perempuan di

Gambia semakin terbuka lebar mengingat banyak pihak-pihak yang mau berkontribusi, terutama dalam persoalan hak kesehatan dan pendidikan perempuan-perempuan di Gambia.

Samburu Girls Foundation menggunakan pendidikan untuk melindungi anak perempuan dari FGM dan mempromosikan hak asasi mereka. Lebih dari seribu wanita muda telah diselamatkan dan diberi tempat untuk tinggal di pusat penyelamatan organisasi. Lembaga ini juga menjangkau masyarakat Somalia, Maasai, Samburu dan Pokot dengan berbicara dalam bahasa Swahili dalam upaya menyatukan berbagai kelompok budaya ini menentang FGM dan pernikahan anak. (Ali, 2020).

Sedangkan Five Foundation bermitra dengan badan amal besar seperti ActionAid, Plan International dan Women for Women International, serta dengan puluhan kelompok akar rumput seperti Samburu Girls Foundation dan Safe Hands for Girls (Ali, 2020).

Dengan penggalangan kekuatan yang melibatkan seluruh NGO di Afrika dan keterlibatan dunia internasional, seperti WHO, terdapat sejumlah organisasi - baik nasional maupun internasional - yang bekerja di bidang FGM atau pada isu-isu yang memiliki asosiasi langsung / tidak langsung. Organisasi dengan mandat eksplisit untuk menangani FGM termasuk Asosiasi untuk Mempromosikan Perempuan dan Kemajuan Perempuan (APGWA), BAFROW, GAMCOTRAP, Tostan dan Wassu Gambia Kafo, serta ActionAid dan Activista dan Future In Our Hands (FIOH). UNICEF dan UNFPA menyediakan dana yang signifikan melalui Program Bersama.

Terdapat pula organisasi-organisasi internasional yang juga berkontribusi dalam pada masalah-masalah yang secara luas terkait dengan FGM, seperti hak-hak perempuan, kesehatan reproduksi perempuan, pemberian layanan kesehatan, pendidikan hukum, dan upaya 'pemberdayaan' melalui peningkatan pendapatan dan peningkatan kesadaran. Ini termasuk Concern Universal, ChildFund, Avisu dan Child Protection Alliance. Organisasi-organisasi dengan fokus khusus pada FGM - atau dengan profil signifikan yang bekerja lebih luas di seluruh negeri mengenai isu-isu terkait (28toomany, 2015: 57).

Di lapangan, pemerintah dan organisasi non-pemerintah, baik organisasi lokal maupun internasional, bekerja sama dengan masyarakat setempat dalam merumuskan dan melaksanakan program-program. Program yang paling sukses adalah berbasis masyarakat dengan dukungan kuat dari dan keterlibatan pemerintah dan lembaga kerja sama pembangunan (WHO, 2008: 19).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam menyediakan standar internasional dan mempromosikan dan melakukan penelitian, bekerja sama dengan mitra akademik dan pembangunan, untuk memastikan bahwa standar didasarkan pada bukti yang kuat. Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa berada di posisi yang tepat untuk mempromosikan kerja sama dan koordinasi di antara semua aktor. Beberapa badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ditugaskan untuk memantau pelaksanaan komitmen hukum internasional untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia untuk semua orang tanpa diskriminasi apa pun.

Peran lembaga kerjasama pembangunan dalam mendukung inisiatif internasional dan nasional dengan memberikan dukungan teknis dan keuangan juga penting untuk mencapai tujuan bersama yaitu mengakhiri mutilasi genital perempuan (WHO, 2008: 20). Hal ini sejalan dengan keberadaan organisasi yang kuat dan kompeten memang sangat diperlukan untuk mempertahankan program untuk meninggalkan mutilasi genital perempuan, karena persoalan FGM membutuhkan sumber daya keuangan dan pengembangan kapasitas yang besar (WHO, 2008: 20). Bahkan, perjuangan untuk mengakhiri FGM sekarang bersifat global, dengan lembaga-lembaga internasional seperti Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di pucuk pimpinan, dan mendapat dukungan kuat dari pemerintah, seperti Inggris dan organisasi nonpemerintah (LSM/NGO) (Shetty, 2014).

Dalam melibatkan masyarakat untuk turut serta dalam kampanye maupun program sosial, empat dari lima organisasi utama yang bekerja secara khusus dalam FGM memanfaatkan strategi pelibatan masyarakat, mempromosikan dialog dan diskusi di antara anggota masyarakat (APGWA, Tostan, BAFROW, GAMCOTRAP). Pendekatan-pendekatan ini merupakan kombinasi dari pendekatan berbasis kesehatan, berbasis hak, dengan BAFROW dan APGWA juga

mengadvokasi ritus peralihan alternatif. Yang kelima, Wassu Gambia Kafo, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan membangun basis bukti negara melalui penelitian sistematis tentang konsekuensi kesehatan dari FGM (28toomany, 2015: 58).

Melalui penggalan kekuatan untuk menghapuskan FGM dan memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan gender dan hak perempuan di segala aspek sosial, upaya secara kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif memberikan pengaruh besar untuk memperluas pengaruh dan merubah pola pikir masyarakat yang terbiasa dengan praktik FGM. Penggalan kekuatan dilakuakn sebagai gerakan sosial yang lebih bersifat masif dan memberikan kekuatan yang lebih besar dalam membentuk sebuah konstruksi sosial yang baru untuk meningkatkan status, kekuasaan, atau pengaruh dari seluruh kelompok gerakan sosial di Gambia, terutama dmenggalan kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas dan pihak pihak lainnya yang selama ini berkontribusi pada praktik FGM dan pelanggaran HAM melalui tindakan diskriminatif serta menghilangkan hak-hak perempuan untuk berdiri sejajar dengan laki-laki.

Melalui gerakan sosial, baik secara domestik maupun melalui penggalan kekuatan yangh melibatkan banyak pihak, telah mendorong perubahan besar dalam membentuk sebuah konstruksi sosial bermasyarakat yang lebih mengedepankan posisi perempuan sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi hak-haknya. Dengan gerakan sosial yang dijalankan melalui advokasi dan resistensi melalui berbagai kampanye pendidikan, politik, maupun sosial, praktik FGM berhasil dihilangkan.

Bukti keberhasilan antara 2013 dan 2016, prestasi NGO-NGO dan aktivis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan meliputi: (diningforwomen.org, 2016).

1. Berhasil melakukan advokasi pada 2014-2015 untuk membuat undang-undang yang menjadikan FGM ilegal di Gambia. Pada 2016, pernikahan anak, yang terkait erat dengan FGM, dilarang.
2. Pada awal 2014, meluncurkan petisi yang ditandatangani oleh lebih dari 221.000 orang, menyerukan pemerintah AS untuk menentukan prevalensi

FGM di AS. Juni itu, Safe Hands for Girls memberikan kesaksian di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada Januari 2016, CDC menerbitkan penelitian yang menunjukkan bahwa 503.000 perempuan dan gadis di AS selamat atau berisiko mengalami FGM.

3. Mengorganisir Konferensi Islam Nasional pertama tentang FGM di Gambia pada Januari 2016. Pada akhir konferensi, 16 dari 23 anggota Dewan Islam Tertinggi berjanji mendukung untuk mengakhiri FGM.
4. Pada bulan Desember 2016, menjadi tuan rumah bersama KTT AS pertama untuk Mengakhiri FGM dengan Equality Now di Washington, DC, dengan tujuan 1) memajukan komitmen AS untuk mengakhiri praktik dan 2) menyatukan para aktivis, masyarakat sipil dan para pemimpin pemerintah untuk berbagi praktik terbaik dan untuk meluncurkan Jaringan AS yang sedang berlangsung untuk Mengakhiri FGM. Lebih dari 200 peserta dari 25 negara hadir.

Selain itu, program pendidikan yang memungkinkan untuk 1.500 siswa di lima sekolah dasar dan menengah tentang FGM dan dampak serta konsekuensinya terhadap kesehatan, dijalankan untuk mempersiapkan generasi baru untuk meninggalkan FGM untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka.

Bahkan secara internasional, upaya NGO dan aktivis dalam kampanye menentang FGM di Gambia telah dilakukan oleh jaringan LSM yang luas. Untuk memperkuat koordinasi, melacak hasil dan memantau kemajuan, Biro Perempuan dan Kementerian Perempuan Gambia telah mengembangkan Rencana Nasional untuk Pengabaian Tercepat dari FGM sebagai upaya untuk mengoordinasikan kegiatan mitra pembangunan yang bekerja untuk melindungi hak-hak perempuan, perempuan dan anak perempuan. Upaya ini telah didukung oleh Program Bersama UNICEF / UNFPA dan termasuk sebagai target pengesahan legislatif pada FGM dan pelibatan pemerintah Gambia dalam merumuskan untuk membentuk Komite Pengarah Nasional untuk Kekerasan Berbasis Gender (28toomany, 2015: 58).

Dengan begitu, gerakan sosial yang melibatkan aspirasi kaum perempuan dalam melakukan perubahan besar dengan menghilangkan budaya yang dianggap merugikan perempuan, terutama hak-hak perempuan di berbagai aspek sosial, telah

berhasil memberikan perubahan besar bagi kehidupan perempuan-perempuan di Gambia dalam memperoleh hak-haknya sebagai perempuan.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Dalam latar belakang sosial yang berkembang di Gambia, perempuan biasanya menempati status yang lebih rendah daripada laki-laki, dengan peran perempuan dan norma *gender* dipandu oleh prinsip dominasi laki-laki. Interaksi antara laki-laki dan perempuan ditentukan oleh masalah kuat patriarki yang ada di berbagai kelompok etnis.

Dengan kebiasaan tersebut, maka kontrol patriarki menjadi hal yang biasa dimana segala sesuatu yang menyangkut kebiasaan, seperti praktik FGM, menjadi keharusan bagi setiap keluarga yang memiliki anak perempuan untuk menjalankan sunat atau pemotongan bagian tertentu di alat kelamin perempuan.

Perkembangan *Female Genital Mutilation* (FGM) atau sunat perempuan telah lama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi kehidupan sehari-hari di Gambia. Faktor kebiasaan yang telah lama dilakukan sejak dulu dan kesepakatan sosial menjadi faktor-faktor yang melanggengkan kebiasaan FGM sebagai bagian dari budaya masyarakat Gambia.

Kehidupan masyarakat Gambia yang lebih memberikan ruang bagi laki-laki dalam memutuskan aturan sosial, serta tingkat kepercayaan terhadap nilai-nilai budaya tradisional yang sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, serta konsekuensi dan strata sosial, dan lemahnya peningkatan sumber daya perempuan, serta tingkat pendidikan yang rendah terkait praktik FGM, menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dan memperkuat budaya patriarki dalam masyarakat Gambia. Hal ini tentu saja mendorong pembentukan kelembagaan sosial, seperti keluarga, lingkungan dimana persoalan-persoalan sosial dijalankan, dan lembaga pendidikan membentuk kondisi sosial yang dikonstruksikan sebagai pemahaman yang mempengaruhi pola pikir dan kondisi sosial di Gambia.

Dalam perspektif HAM, terutama hak kesehatan perempuan, mutilasi genital wanita (pemotongan genital wanita dan mutilasi genital wanita / pemotongan) didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang

mengacu pada semua prosedur yang melibatkan penghapusan sebagian atau total genitalia wanita eksternal atau cedera lain pada genital wanita. organ karena alasan non-medis. FGM adalah bentuk kekerasan berbasis gender dan telah diakui sebagai praktik berbahaya dan pelanggaran hak asasi manusia anak perempuan dan perempuan.

Praktik tersebut (FGM) merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan karena praktik yang dilakukan di Republik Gambia merupakan usaha untuk mengontrol tubuh perempuan. Seharusnya perempuan memiliki kemerdekaan atas tubuh mereka sendiri, namun pada kenyataannya mereka harus terjebak di dalam praktik yang secara struktur dan budaya merupakan upaya kekerasan terhadap diri mereka dan ini termasuk kedalam pelanggaran HAM.

Persoalan tersebut yang menjadi persoalan yang terjadi di Gambia. Persoalan FGM bukan hanya semata-mata pada persoalan teknis tentang pemotongan bagian kecil alat kelamin perempuan, namun persoalan FGM merupakan hal-hal yang menyangkut posisi wanita dalam kehidupan sosial di Gambia.

Praktik FGM merupakan perilaku yang menjadikan perempuan sebagai sebuah objek dari persoalan budaya yang telah lama berkembang. Tanpa disadari, FGM tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang benar atau salah, namun lebih kepada aturan yang harus dijalankan karena menyangkut dan mempengaruhi seluruh aspek perempuan dalam kehidupan sosialnya.

Dengan kata lain, praktik FGM sama sekali tidak mencerminkan kesetaraan posisi wanita dan laki-laki. Kedudukan perempuan berada dibawah laki-laki, perempuan memiliki kedudukan yang tidak sama dengan laki-laki serta hak-hak dan peranan yang dihilangkan karena faktor budaya serta peran negara yang tidak memperjuangkan hak-hak perempuan.

Dalam kondisi sosial tersebut, terdapat individu-individu serta kelompok yang memiliki perspektif berbeda yang menentang wewenang, status quo, serta budaya yang mapan, yaitu praktik FGM yang dianggap melanggar HAM. Adanya keresahan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap praktik FGM, dorongan perubahan sosial untuk menghapus praktik tersebut sebetulnya besar. Banyak

individu-individu, terutama kaum perempuan yang menginginkan perubahan sosial yang lebih berpihak kepada mereka.

Para aktivis yang tergabung di dalam NGO-NGO, seperti The Girls Agenda, dan Safe Hands for Girls, yang melakukan social movement atau pergerakan sosial untuk melakukan perubahan terhadap praktik FGM di Gambia, berupaya untuk melakukan advokasi kepada masyarakat tentang dampak negatif FGM bagi kaum perempuan sekaligus melakukan resistensi atau perlawanan terhadap praktik FGM sebagai sebuah budaya yang perlu dihilangkan dalam kehidupan sosial di masyarakat Gambia.

Gerakan sosial yang dimotori oleh NGO-NGO di Gambia, yang sebagian besar dilakukan oleh aktivis-aktivis perempuan dengan tujuan mendapatkan hak-hak perempuan, terutama kesehatan dan hak sosial lainnya, maka munculnya gerakan social di Republik Gambia merupakan upaya para Feminist untuk menolak adanya praktik yang berbahaya; dalam hal ini FGM, serta mendorong para perempuan untuk berani melawan dan mengatakan tidak pada praktik ini.

Berbagai program pendidikan yang ditujukan untuk menentang wewenang dan pelestarian budaya FGM, serta perluasan pengaruh dalam meningkatkan dan memperkuat perspektif tentang feminis, yaitu nilai-nilai dan hak-hak perempuan.

Pergerakan sosial melalui kampanye tersebut ditujukan untuk memberikan advokasi pendidikan tentang berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh praktik FGM. Advokasi menjadi saran bagi NGO dan aktivis untuk memberikan pemahaman dalam merubah berbagai persoalan sosial terkait hak-hak perempuan.

Pergerakan feminisme dalam social movement di Gambia ditujukan untuk menciptakan kesetaraan gender dan hilangnya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Gambia sehingga penerapan FGM dapat dihilangkan. Pergerakan feminist social movement itu sendiri dilakukan untuk memperjuangkan melalui pergerakan sosial untuk merubah kondisi politik, terutama peran negara dalam melindungi hak-hak perempuan melalui kepastian hukum dan undang-undang.

Persoalan tingginya ketimpangan gender yang berakibat pada langgengnya praktik FGM, mendorong berbagai aktivis maupun NGO dalam gerakan sosial untuk menghimpun kekuatan dan saling mendukung satu sama lain. Penggalangan

kekuatan dimaksudkan untuk meningkatkan pengaruh secara luas ke masyarakat Gambia, baik melalui media maupun kolaborasi dan kerjasama, serta menggandeng pihak di luar Gambia.

NGO-NGO di Gambia, seperti Safe Hand for Girl dan The Girl Generation juga melibatkan NGO-NGO di negara lain di Afrika, mengingat persoalan FGM terjadi hampir di seluruh wilayah Afrika. Melalui kolaborasi, maka kampanye untuk mengadvokasi dan menentang praktik FGM akan menjadi lebih masif dan memberikan dukungan yang lebih luas, terlebih lagi, dunia internasional semakin menyoroti persoalan FGM di Gambia dan wilayah Afrika lainnya.

Dengan penggalangan kekuatan yang melibatkan seluruh NGO di Afrika dan keterlibatan dunia internasional, seperti WHO, terdapat sejumlah organisasi - baik nasional maupun internasional - yang bekerja di bidang FGM atau pada isu-isu yang memiliki asosiasi langsung / tidak langsung. Organisasi dengan mandat eksplisit untuk menangani FGM termasuk Asosiasi untuk Mempromosikan Perempuan dan Kemajuan Perempuan (APGWA), BAFROW, GAMCOTRAP, Tostan dan Wassu Gambia Kafo, serta ActionAid dan Activista dan Future In Our Hands (FIOH). UNICEF dan UNFPA menyediakan dana yang signifikan melalui Program Bersama.

Peran lembaga kerjasama pembangunan dalam mendukung inisiatif internasional dan nasional dengan memberikan dukungan teknis dan keuangan juga penting untuk mencapai tujuan bersama yaitu mengakhiri mutilasi genital perempuan. Penggalangan kekuatan dilakukn sebagai gerakan sosial yang lebih bersifat masif dan memberikan kekuatan yang lebih besar dalam membentuk sebuah konstruksi sosial yang baru untuk meningkatkan status, kekuasaan, atau pengaruh dari seluruh kelompok gerakan sosial di Gambia, terutama dmenggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas dan pihak-pihak lainnya yang selama ini berkontribusi pada praktik FGM dan pelanggaran HAM melalui tindakan diskriminatif serta menghilangkan hak-hak perempuan untuk berdiri sejajar dengan laki-laki.

Melalui gerakan sosial yang masif, terdapat keberhasilan gerakan sosial feminis tersebut yang menghasilkan berbagai aturan dan Undang-Undang (UU)

yang menjadikan praktik FGM, sebelumnya sebagai sebuah budaya dalam aspek sosial, kini menjadi ilegal. Selain itu, terdapat pula koordinasi kegiatan mitra pembangunan yang bekerja untuk melindungi hak-hak perempuan, perempuan dan anak perempuan. Upaya ini telah didukung oleh Program Bersama UNICEF/UNFPA dan termasuk sebagai target pengesahan legislatif pada FGM dan pelibatan pemerintah Gambia dalam merumuskan untuk membentuk Komite Pengarah Nasional untuk Kekerasan Berbasis Gender.

6.2. Saran

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yang memfokuskan pada feminist social movement atau gerakan sosial feminis yang ditujukan untuk melakukan perubahan sosial yang selama ini dianggap melanggar hak-hak perempuan di dalam berbagai aspek sosial, diantaranya hak kesehatan perempuan

Menariknya, penelitian ini menjelaskan peranan Non Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan perubahan terhadap praktik FGM yang sudah sejak lama menjadi budaya di Gambia.

Penelitian yang dilakukan ini pada akhirnya menjelaskan bahwa gerakan sosial feminis mampu melakukan perubahan sosial yang lebih berpihak pada perempuan dalam mendapatkan hak-haknya, terutama kesetaraan gender dan non diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Meski begitu, masih banyak persoalan-persoalan tentang FGM dan persoalan budaya patriarki yang tidak menjadi tema pembahasan utama di dalam skripsi ini.

Karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk menarik minat jika terdapat penelitian-penelitian lain yang ingin melanjutkan pembahasan tentang persoalan HAM dan peranan perempuan dalam persoalan sosial, seperti pendidikan, perekonomian, serta keterlibatan dunia internasional dalam kehidupan perempuan-perempuan di Gambia.